

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia telah di berlakukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mana diterbitkan pada 16 Juli 2008, meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah terutama di lingkup nasional karena landasan dan hukum yang sangat kuat dan memadai. Dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dengan pertumbuhan asset yang cukup tinggi.

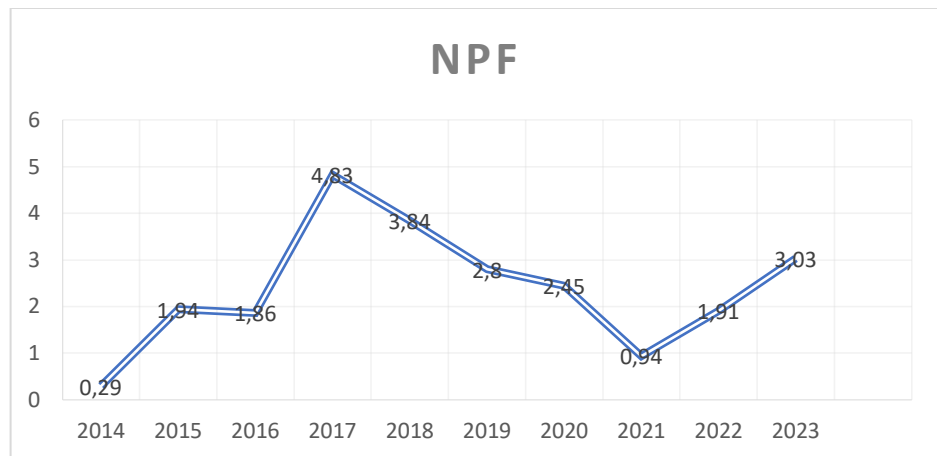
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 12 menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melibatkan pemberian uang atau tagihan yang sesuai dengan kebutuhan orang yang menerimanya. Hal ini dilakukan melalui kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Orang yang menerima uang atau tagihan harus mengembalikannya setelah waktu tertentu, disertai dengan pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal kontrak. Menurut prinsip perbankan syariah, pengenaan bunga (riba) tidak diperbolehkan dalam produk atau layanan keuangan apa pun. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan

atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal kontrak. Pembagian ini dapat berupa persentase atau berdasarkan rasio yang ditetapkan.

Pada bank syariah pembiayaan memiliki peran penting dalam penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Dalam meminimalisir resiko yang dapat terjadi dan memaksimalkan keuntungan, bank harus melakukan analisis pembiayaan. Pada bank syariah pembiayaan yang disalurkan tidak hanya pembiayaan yang sehat, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah juga terdapat pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah. Bank syariah harus pintar dan selektif dalam memilih nasabah untuk menyalurkan dananya agar menghindari terjadinya pembiayaan yang kurang lancar atau pembiayaan bermasalah (Septiatin, A., 2022).

Pembiayaan bermasalah atau NPF, mengacu pada pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi profitabilitas Bank Syariah. Menurut POJK No. 15, Bank dianggap tidak sehat jika rasio NPF-nya melebihi 5%. Tingkat NPF Bank yang tinggi menunjukkan kualitas pembiayaan yang buruk, begitu pula sebaliknya. NPF di Bank Syariah cenderung meningkat setiap tahun, yang menyebabkan inefisiensi dalam sistem Perbankan dan berdampak negatif jangka panjang (Effendi, J., 2017).

Gambar 1. 1 Data Non Performing Financing PT. Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2014-2023



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan data diolah

Ketika tahun 2018 hingga tahun 2023, angka NPF pada Bank Panin Dubai Syariah mengalami kenaikan dan penurunan yang beragam besarnya di Indonesia. Di tahun 2014 nilai NPF pada Bank Panin Dubai Syariah rendah sampai dengan 0.29%, pada tahun berikutnya nilai NPF pada bank Panin Dubai Syariah naik dari tahun 2015 sampai 2023 hingga 3.03%. Nilai NPF Bank Panin Dubai Syariah pernah mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2017 hingga 4.83% yang artinya bank syariah berada pada titik bank yang tidak sehat.

Dari data laporan keuangan perbankan yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada beberapa bank syariah yang mengalami peningkatan NPF melebihi batas wajar yang telah ditetapkan dalam

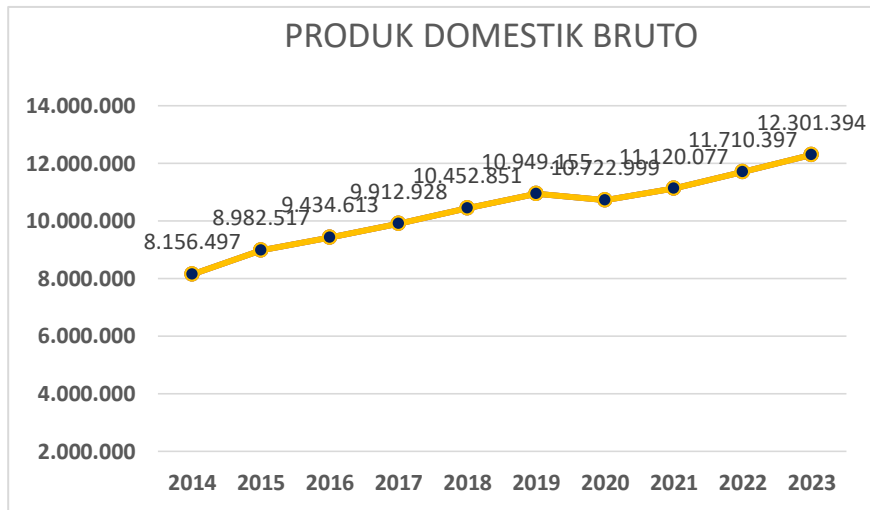
POJK. *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah pada dasarnya dapat disebabkan oleh dua faktor utama, diantaranya faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud faktor internal ini adalah diperoleh dari hasil kegiatan operasional bank, baik itu strategi ataupun kebijakan pada pihak bank terkait penyaluran pembiayaan yang sudah tertera pada laporan keuangan bank (Asmara, K., 2019). Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan oleh kondisi makro yaitu dapat berupa Produk Domestik Bruto (PDB) dan *BI Rate* (Hanif & Aldilla, 2021).

Penelitian ini berfokus pada faktor eksternal yaitu makro ekonomi yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Model ekonomi makro telah digunakan dalam perumusan kebijakan ekonomi hampir disetiap negara. Ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang memiliki pokok bahasan mengenai analisis suatu unit-unit yang lebih besar, secara menyeluruh dari sistem perekonomian. Variabel ekonomi makro juga dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang mencakup semua peristiwa yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara umum (Fata, M., 2017). Perkembangan ekonomi yang tidak pasti akan digambarkan dengan kondisi ekonomi yang menurun atau meningkatnya tingkat pembiayaan yang tidak terorganisir. Jika indikator ekonomi terpantau baik, maka tingkat pembiayaan

bermasalah akan membaik juga begitupun sebaliknya (Septiatin, A. et al., 2022).

Variabel ekonomi makro yang pertama adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Jika angka PDB tinggi, maka pendapatan rata-rata masyarakat pada negara tersebut tinggi, dan begitu sebaliknya. Disaat bank menyalurkan pembiayaannya, perbankan melihat peningkatan PDB sebagai indikatornya sehingga pertumbuhan akan tetap terjaga. Ketika angka PDB meningkat, maka angka NPF akan menurun, apabila pendapatan yang didapatkan masyarakat atau perusahaan meningkat, usaha yang dijalankan oleh produsen berjalan dengan baik (Cahyani, Y., 2018).

Diperlukan modal untuk dapat mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat agar semakin berkembangnya Tingkat PDB. Sehingga masyarakat mengajukan pembiayaan pada bank untuk keperluan modal usaha, masyarakat harus membayar kewajibannya kepada bank dalam ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika bank berani memberikan pembiayaan dalam jumlah yang tinggi kepada nasabah, maka risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalahnya juga semakin besar.

Gambar 1. 2 Produk Domestik Bruto

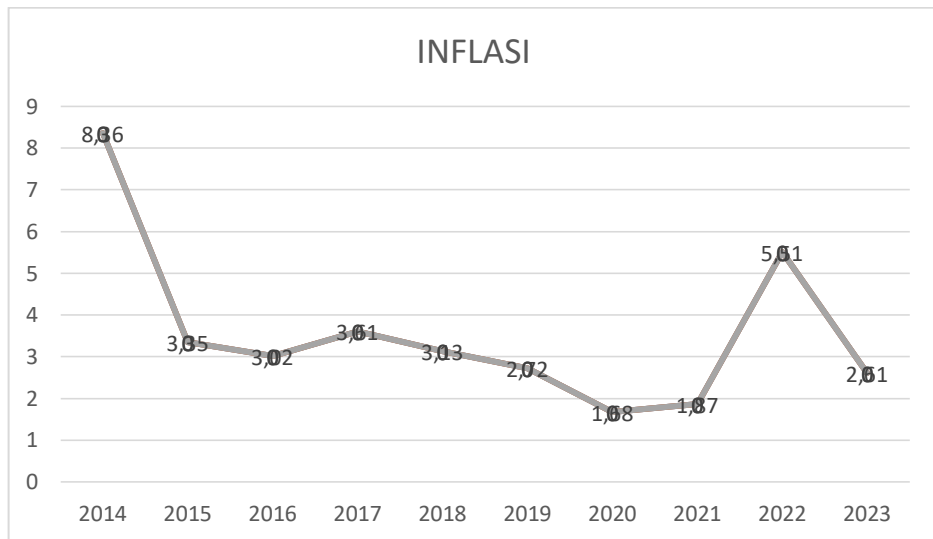
Sumber : Badan Pusat Statistik dan data diolah

Pada data Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperoleh dalam periode tahun 2018 sampai tahun 2022 bahwa dari tahun ke tahun PDB selalu meningkat. Pada tahun 2018, nilai PDB sebesar Rp10.452.851 sedangkan pada tahun 2022 nilai PDB meningkat mencapai Rp11.710.397. Jadi berdasarkan data yang ada, maka dari tahun 2018 sampai tahun 2022 nilai PDB mengalami peningkatan sebesar Rp1.257.546.

Pada tahun 2020, nilai PDB menurun sebesar Rp10.722.999 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia. Akibatnya, selama tahun 2020, perusahaan manufaktur mengalami penurunan kualitas pengelolaan

aset, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kepada Bank. Hal ini menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah (Waluya, A., & Jannah, W., 2022).

Variabel makro ekonomi selanjutnya adalah inflasi, perhatian terbesar diberikan pada naik dan turunnya inflasi pada suatu negara, inflasi sering dianggap sebagai masalah perekonomian yang sering terjadi. Upaya pengendalian inflasi untuk mencegah terjadinya inflasi memerlukan kebijakan perekonomian yang biasa disebut dengan stabilitas harga. Inflasi berdampak pada industri perbankan, apabila tingkat inflasi tinggi maka harga barang akan meningkat dan sebaliknya. Ketika harga suatu barang naik, pengeluaran masyarakat juga akan meningkat bahkan lebih besar dari biasanya. Peningkatan belanja pemerintah tersebut tidak sebanding dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank, sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan kredit bermasalah (NPF) (Asmara, K., 2019).

Gambar 1. 3 Inflasi

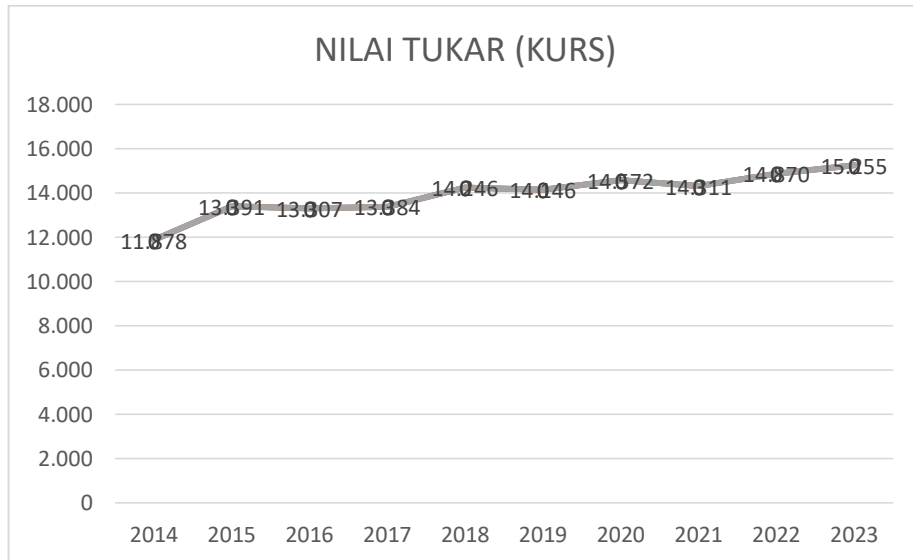
Sumber: Bank Indonesia dan data diolah

Data inflasi periode 2014 sampai 2023 bervariasi setiap tahunnya. Tingkat inflasi tertinggi ada pada tahun 2014 hingga 8,36% namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 tingkat inflasi menurun sebesar 3,05% tingkat inflasi terendah berada pada tahun 2020 hingga 1,68%. Akan tetapi tingkat inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai 5,51% pada tahun 2022, hal ini menunjukkan tingkat inflasi naik turun dari tahun ketahun.

Inflasi menyebabkan harga-harga terus naik dan daya beli masyarakat menurun, namun inflasi semakin menurunkan nilai uang. Laju kenaikan inflasi pada tahun 2022 sebesar 5,51% merupakan laju kenaikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, tingkat inflasi pada tahun 2021 hanya sebesar 1,87%. Berdasarkan hal tersebut, bisnis di berbagai industri mencatat kenaikan terbesar pada biaya operasional dan pengeluaran yang diperlukan, sehingga mengakibatkan penurunan penjualan, memburuknya kondisi bisnis, atau memburuknya kondisi bisnis. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya NPF karena nasabah bank syariah kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank syariah (Mahdi, F., 2019).

Variabel makroekonomi yang terakhir adalah nilai tukar rupiah yang biasa dikenal dengan kurs. Nilai tukar adalah perbandingan nilai mata uang pada suatu negara dengan negara lainnya. Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah nilai rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). Jika nilai rupiah turun, risiko yang dihadapi perbankan cukup besar. Dengan melemahnya nilai rupiah, terdapat risiko penurunan usaha nasabah bank jika barang yang digunakan dalam usahanya diimpor. Dalam hal ini, pendapatan nasabah dapat menurun dan akibatnya nasabah tidak mampu membayar kewajibannya pada bank. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah atau peningkatan jumlah NPF di bank syariah (Septiatin, A., et al., 2022).

Gambar 1. 4 Nilai Tukar (Kurs)

Sumber: Bank Indonesia dan data diolah

Selama periode 2014 sampai 2023, data nilai tukar rupiah mencatatkan kenaikan dan penurunan terhadap USD setiap tahunnya. Nilai tukar terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 11.878, dan nilai tukar tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.255. Berdasarkan uraian data nilai tukar terdapat selisih Rp. 3,377 pada tahun 2014 sampai tahun 2023. Akibat keadaan ini, nasabah bank mengalami kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan biaya produksi, hal ini mengakibatkan pengusaha cenderung mengurangi dana yang diperoleh dari pinjaman bank. Sementara itu bank terkena dampaknya sehingga membuat mereka menghadapi peningkatan risiko

pendanaan akibat kenaikan biaya produksi (Nasution, S., & Sudiarti, S., 2023)

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo dkk (2017) menunjukkan bahwa PDB berpengaruh terhadap NPF, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Asmara (2019) menunjukkan PDB tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil penelitian yang dilakukan Septiatin dkk (2022) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF, tetapi menurut Mahdi (2019) inflasi dinyatakan berpengaruh terhadap NPF. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septiatin dkk (2022) menunjukkan bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh terhadap tingkat NPF, tetapi menurut Asmara (2019) nilai tukar (kurs) dinyatakan tidak berpengaruh terhadap NPF.

Berdasarkan dari data diatas pada tahun 2014 hingga 2019 masa sebelum covid-19, pertumbuhan PDB berada kisaran 5% per tahun, dengan inflasi yang terkendali dibawah 3.5%, serta nilai tukar rupiah cukup stabil terhadap dolar AS, sedangkan untuk rasio NPF pada bank panin dubai syariah masih sangat terkendali dibawah 5%, menunjukkan kualitas pembiayaan yang baik. Pada tahun 2020 hingga 2021 pas masa covid-19 memberikan tekanan besar terhadap sistem keuangan nasional, nilai PDB menurun sebesar Rp. 10.722.999 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, inflasi menurun hingga

mencapai 1.68%, namun penurunan ini lebih disebabkan oleh lemahnya permintaan, nilai tukar rupiah sempat melemah tajam terhadap dolar AS di awal pandemi, sedangkan NPF pada bank panin dubai syariah masih bisa terkendali sebesar 2.45%, menunjukkan kualitas pembiayaan yang baik. Sedangkan pada tahun 2022 hingga 2023 pasca covid-19, nilai PDB meningkat pesat sebesar RP. 11.710.397, tingkat inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai 5.51% pada tahun 2022, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga mencapai RP. 15.255 pada tahun 2023, sedangkan NPF pada bank panin dubai syariah mengalami kenaikan hingga 3.03% pada tahun 2023.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, menunjukkan tidak ada konsistensi dari hasil penelitian yang di dapat. Sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui konsistensi pada penelitian yang baru. Jadi, berdasarkan dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Tingkat *Non-Performing financing* (NPF) pada Bank Panin Dubai Syariah yang tinggi sehingga melebihi batas aman dari yang ditetapkan sebesar 5% di tahun 2017 yang menunjukkan bahwa kondisi NPF pada tahun tersebut sedang tidak sehat.
2. Penurunan nilai Produk Domestik Bruto yang terjadi pada tahun 2020 yang terjadi akibat datangnya pandemi covid-19 sehingga perusahaan-perusahaan manufaktur mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam membayar kewajibannya kepada bank.
3. Peningkatan nilai Inflasi yang terjadi pada 2022 mengakibatkan penjualan menurun dan kemunduran kondisi usaha, sehingga berpengaruh pada kemampuan membayar kewajiban pada bank.
4. Peningkatan nilai Kurs pada tahun 2023, pendapatan perseroan akan meningkat karena nasabah bank akan merasakan kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan biaya produksi. Hal ini berdampak pada perbankan yang menghadapi peningkatan risiko pendanaan akibat kenaikan biaya produksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan Bermasalah secara parsial pada Bank Panin Dubai Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan Bermasalah secara simultan pada Bank Panin Dubai Syariah?
3. Seberapa berpengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Panin Dubai Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Pembiayaan Bermasalah secara parsial pada Bank Panin Dubai Syariah.
2. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah secara simultan pada Bank Panin Dubai Syariah.

3. Mengetahui pengaruh Nilai Tukar terhadap Pembiayaan Bermasalah secara parsial pada Bank Panin Dubai Syariah
4. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan bermasalah secara simultan pada Bank Panin Dubai Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan terhadap penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan

Sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan evaluasi terhadap para praktisi perbankan syariah maupun pemerintah dalam mengelola Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Panin Dubai Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi tambahan kepada masyarakat umum tentang pengetahuan terhadap Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Panin Dubai Syariah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan serta memberikan informasi mengenai Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Panin Dubai Syariah.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Panin Dubai Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk mempermudah dalam menulis skripsi. Berikut ini penjelasan penulisan skripsi yang terdiri dari :

BAB kesatu Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua Kajian Pustaka

Pada bab ini menguraikan kajian pustaka yang menjadi landasan dalam menyusun penelitian ini, yang berisi kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan, variabel dan hubungan antara variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB ketiga Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang dilakukan waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB keempat Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya dan temuan-temuan disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah.

BAB kelima Penutup

Pada bab ini memberikan jawaban yang ringkas dan runtut terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kemudian penulis sampaikan pada sub kesimpulan. Kemudian pada saran berisi masukan

berdasarkan hasil temuan penelitian dan dapat ditunjukkan pada pembuat kebijakan atau penelitian selanjutnya.